



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491004 Faksimile (0293) 491040
Laman: www.temanggungkab.go.id Pos-el : info@temanggungkab.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 555/ TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan untuk informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan untuk memenuhi hak setiap Pemohonan Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik badan publik berkewajiban melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di masing-masing Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 Februari 2026

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

CAP TTD

RIPTO SUSILO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung.

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI

Pada hari ini, Kamis tanggal 19 Bulan Februari Tahun 2026 bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini:

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka penyaringan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	1 Tahun
2	Proses Pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan Perceraian	Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengungkap data pribadi/PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	1 Tahun
3	Identitas PNS yg melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4	Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan banding administratif atas hukuman disiplin PNS	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
5	Proses pemberhentian PNS	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
6	Proses Keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
7	Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan perusahaan dan fungsional, dan notulansi hasil rapat Baperjakat	- Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghamb at kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premateur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
8	Data hasil Tes Potensi/kompetensi PNS/Pejabat	Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
9	Data rencana penempatan CPNS/PNS	Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Mencegah kolusi	1 Tahun
10	Dokumen Dan Formulir Isian Pegawai	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak privasi PNS	1 Tahun
11	Biodata Elektronik ASN dan Non ASN (Database)	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak privasi PNS	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Pelindungan Data Pribadi			
12	Data PNS yang akan Di angkat dalam Jabatan : 1. Pimpinan Tertinggi 2. Administrator 3. Pengawas	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun
13	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun
14	Data Presensi PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun
15	Data Pribadi Penderita Kasus AFP (Non Polio), PD3I, KLB , Covid 19	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Data Pribadi tentang penyakit pasien akan menyebar ke publik	Melindungi hak pribadi pasien	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
16	Data Pribadi Penderita Kasus Penyakit Menular dan Kasus Penyakit Tidak Menular	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Data Pribadi tentang penyakit pasien akan menyebar ke publik	Melindungi hak pribadi pasien	1 Tahun
17	Biodata Anggota Perpustakaan yang memuat Nama, NIK, Alamat, Nomor Telepon, Alamat elektronik	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Kerahasiaan dan perlindungan data pribadi	1 Tahun
18	Proses penyelidikan & penyidikan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan ☐ perusahaan ☐ atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1 Tahun 2022 tentang Cipta	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Kerja menjadi Undang-Undang			
19	Proses Rencana pembinaan dan Pengawasan ketaatan Pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha/kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) terhadap ketentuan Perizinan □erusahaan□au Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup	Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	1 Tahun
20	Proses penyelesaian sengketa/aduan/konflik lingkungan hidup (PSLH) yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau berdampak pada lingkungan hidup	Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun	Menghambat proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang			
21	Dokumen Pemeriksaan, Reviu, dan Evaluasi	- Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 23 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dapat disalah gunakan oleh pihakpihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	- Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara - Membantu badan ☐erusa dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	1 Tahun
22	Dokumen Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan	- Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 23 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dapat disalah gunakan oleh pihakpihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Membantu badan ☐ erusa dalam ☐ erusaha kebijakan	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
23	Daftar Anggota/orang yang terlibat Organisasi Terlarang	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	1 Tahun
24	Data Data yang berkaitan dengan rahasia Pemerintah/ Negar	- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah	Membahayakan Pemerintahan/ Negara	Melindungi Data Pemerintah/ Negara	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
25	Data Keberadaan Orang Asing di Kabupaten Temanggung	- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah	Berpotensi Menimbulkan perusahaan Kriminal yang dapat mengancam keberadaannya	Keberadaan Orang asing menjadi terlindungi	1 Tahun
26	Rekam Medis	- Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi perusahaan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi ☐ erusaha dan fisik seseorang	1 Tahun
27	Data Hutang Pasien Kepada RS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Keterbukaan Informasi Publik		keuangan seseorang	
28	Data Pribadi terkait NIK dan biometrik	Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Risiko Pengaksesan Data yang tidak sah	Melindungi Data Pribadi atas pengaksesan data yang tidak sah	1 Tahun
29	Dokumen Akta Pencatatan Sipil	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; - Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Risiko Pengaksesan Data yang tidak sah	Melindungi Data Pribadi atas pengaksesan data yang tidak sah	2 Tahun
30	Dokumen perizinan yang diterbitkan terkait data	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat mengungkapkan dokumen rahasia	Melindungi dokumen □ perusahaan/peror	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	keuangan,□erus dan design produksi	Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	perusahaan /perorangan	angan yang bersifat rahasia	
31	Data permohonan izin yang belum selesai diproses	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain dan mengganggu proses perizinan	Melindungi dokumen □erusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	1 Tahun
32	Data pribadi anggota DPRD	- Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), pasal 85 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan			
33	Hasil rapat dari jenis-jenis rapat DPRD yang dinyatakan tertutup	- Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan	Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga menyebabkan situasi yang kondusif	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; - Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia			
34	Laporan IT Security Assessment Pemerintah Kabupaten Temanggung	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan perusahaan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
35	Topologi dan konfigurasi Jaringan Internet Pemkab Temanggung	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan perusahaan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun
36	Daftar Internet Protocol (IP)	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan perusahaan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
37	Buku Assesment infrastruktur jaringan internet	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan perusahaan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun
38	Daftar User dan Password perangkat jaringan	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan perusahaan pengrusakan, pencurian data	Melindungi/meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
39	Data aplikasi sebagai berikut: a. OS Server yg digunakan b. Database c. User dan password d. Manual pengembangan web e. Ip public dan Ip local untuk aplikasi yang di onlinekan f. Ip public dan Ip local untuk aplikasi yang di onlinekan	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan perusahaan pengrusakan, pencurian data	Melindungi/meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun
40	Data Gaji, Rekening Tabungan, Pinjaman Pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, asset dan pendapatan seseorang	Informasi yang bersifat pribadi dapat terlindungi, menghindari penyalahgunaan data pribadi seseorang	1 Tahun
41	Data wajib pajak Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi seseorang	Menghindari penyalahgunaan data pribadi seseorang	1 Tahun
42	Database Obyek Pajak dan Retribusi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data	Melindungi/meng amankan database objek	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Keterbukaan Informasi Publik	oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	pajak dan retribusi	
43	Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban, serta anak berhadapan dengan hukum	- Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; - Pasal 5 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; - Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan	Pelanggaran terhadap Undang-Undang	Perlindungan Identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban, serta anak berhadapan dengan hukum	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Kekerasan Dalam Rumah Tangga; - Pasal 3 huruf I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak			
44	Data pribadi tenaga kerja asing	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Mengungkap data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	1 Tahun
45	Data pribadi Pekerja / Buruh	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang	Mengungkap data pribadi pekerja / buruh yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pekerja/ buruh yang bersifat rahasia	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang			
46	Data pribadi perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangan, neraca dan aset	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia	1 Tahun

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

CAP TTD

RIPTO SUSILO